

Penegakan Hak Anak dalam Proyek-Proyek Lanjutan Pelucutan Senjata (*Disarmament*), Demobilisasi, Reintegrasi oleh UNICEF dan *International Rescue Committee* (IRC) bagi Tentara Anak Perempuan Sierra Leone

Damar Kusumawardani
Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga Surabaya
Email : damarwrn@gmail.com

Abstrak

Sierra Leone merupakan salah satu negara dengan penggunaan tentara anak terbesar selama perang sipil yang berlangsung dari tahun 1991-2002. Tentara anak perempuan menyumbang sekitar 30 persen dari total tentara anak yang terlibat dalam perang sipil tersebut. Program Pelucutan senjata (*Disarmament*), Demobilisasi, dan Reintegrasi (DDR) yang merupakan mandat PBB sebagai konsolidasi perdamaian pasca konflik hanya dapat menjangkau 506 dari total 6.845 tentara anak yang berhasil dilucuti senjatanya. Hal ini dikarenakan syarat untuk tahap pelucutan senjata adalah menyerahkan senjata, sedangkan banyak anak-anak perempuan yang tidak dibekali senjata oleh komandan angkatan bersenjata mereka mengingat sebagian besar dari tentara anak perempuan berperan sebagai juru masak, pekerja rumah tangga, hingga *bush wives*. UNICEF dan IRC sebagai organisasi internasional kemudian melaksanakan proyek-proyek lanjutan DDR dengan kebijakan-kebijakan yang lebih responsif terhadap gender dan berbasis komunitas melalui *gender mainstreaming* dan *inclusive citizenship* untuk menegakkan hak anak bagi tentara anak perempuan Sierra Leone. Artikel ini akan membahas penegakan hak bagi tentara anak perempuan Sierra Leone oleh UNICEF dan IRC dalam proyek-proyek lanjutan DDR.

Kata Kunci: tentara anak perempuan; UNICEF; IRC; proyek-proyek lanjutan DDR; hak anak

Abstract

Sierra Leone was one of the countries with the largest use of child soldiers during the civil war between 1991-2002. Girl child soldiers made up to 30 percent of the total child soldiers involved in the Sierra Leone civil war. The Disarmament, Demobilization and Reintegration program (DDR) which was one of the UN mandate as a post-conflict peace consolidation could only reach 506 out of a total of 6,845 child soldiers who have been disarmed. This was because the requirement for the disarmament phase was to hand in their weapon, while many girls were not equipped with weapon by their armed forces commander considering that most of them acted as cooks, house workers, and bush wives. UNICEF and IRC as international organizations then carried out further DDR projects with more gender-responsive and community-based with gender mainstreaming and inclusive citizenship policies to enforce children rights of Sierra Leonean girl soldiers who previously had not included in DDR program. This paper will discuss the enforcement of children rights of Sierra Leonean girl soldiers in the further DDR projects.

Keywords: *girl soldiers; UNICEF; IRC; further DDR projects; children rights*

Pendahuluan

Perang sipil Sierra Leone yang berlangsung dari 1991-2002 melibatkan kelompok pemberontak Revolutionary United Front (RUF) dan Armed Forces Revolutionary Council (AFRC) dengan kelompok pemerintah Sierra Leone Army (SLA) dan Civil Defence Force (CDF). Perang sipil yang dilatarbelakangi oleh pemerintah yang korup dan ketidakstabilan ekonomi yang berkepanjangan mengakibatkan kerusakan 2/3 infrastruktur, 70.0000 korban jiwa, dan 2,6 juta penduduk meninggalkan rumah mereka. Dalam perang sipil ini, anak-anak juga terlibat dalam perang dengan menjadi tentara, baik laki-laki maupun perempuan—yang kemudian disebut dengan tentara anak. Sebagian besar dari mereka direkrut paksa baik oleh kelompok pemberontak maupun kelompok pemerintah. Hal ini kemudian menunjukkan adanya antitesis penegakan hak anak yang seharusnya difasilitasi oleh pemerintah untuk melindungi anak-anak dari ancaman, termasuk penculikan dan kekerasan. Pada akhir konflik tahun 1998—setelah perjanjian perdamaian, Sekjen PBB

memandatkan pembentukan *National Committee on Disarmament, Demobilisation and Reintegration* (NCDDR) untuk mengimplementasikan program Pelucutan Senjata (*Disarmament*), Demobilisasi, dan Reintegrasi (DDR) sebagai konsolidasi pasca-perang yang ditujukan untuk membangun kapasitas perdamaian, keamanan, dan pembangunan jangka panjang dengan berfokus pada pelepasan tentara-tentara yang terlibat dalam perang dari kelompok bersenjata mereka.

Implementasi program DDR di Sierra Leone terdiri dari tiga fase yang dilakukan dari September 1998 hingga Januari 2002 untuk tahap perlucutan senjata dan demobilisasi, dan dilanjutkan dengan upaya reintegrasi hingga Februari 2004 (UNAMSIL, 2005). Dari ketiga fase yang telah dijalankan dari tahun 1998 hingga 2002, program DDR Sierra Leone secara keseluruhan telah melucuti dan memusnahkan sebanyak 42.330 senjata dan memobilisasi sebanyak 72.490 tentara, termasuk 4.751 perempuan (6,5%) dan 6.845 anak-anak (9,4%). Dari jumlah 6.845 tentara anak yang berhasil dilucuti senjatanya dan didemobilisasi,

sebanyak 6.339 merupakan tentara anak laki-laki dan 506 diantaranya tentara anak perempuan (Solomon & Ginifer, 2008: 7). Dari data ini dapat diketahui bahwa program DDR di Sierra Leone pada dasarnya lebih berperan signifikan bagi

sejumlah besar anak laki-laki, namun hanya berhasil menjangkau 506 anak perempuan dari total kurang lebih 12.506 anak perempuan yang diperkirakan terlibat dalam pasukan militer (Mazurana & Carlson, 2004: 20). (Lihat Tabel 1)

Tabel 1: Estimasi Jumlah tentara anak perempuan yang terlibat dalam konflik bersenjata dan program DDR formal Sierra Leone.

Angkatan Bersenjata	Estimasi Jumlah anak perempuan yang terlibat dalam konflik bersenjata	Jumlah anak perempuan dalam DDR formal	Persentase anak perempuan dalam DDR	Persentase total pasukan bersenjata dalam DDR
RUF	7.500	436	6%	54%
AFRC	1.667	41	2%	89%
SLA	1.167	22	2%	Tidak ada data ¹
CDF	1.772	7	0,4%	54%
Total	12.056	506	4%	N/A

Sumber: NCDDR dan UNICEF (2002) dalam Mazurana & Carson, 2004: 20

¹ tidak ada data disebabkan karena kurangnya data yang akurat dalam penentuan estimasi total tentara dewasa laki-laki dan perempuan yang menjalani DDR formal

Hal ini kemudian menjelaskan bahwa terdapat ketimpangan gender dalam program DDR terhadap tentara anak di Sierra Leone. Ketimpangan gender dalam DDR ini disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal ketimpangan gender yang terjadi dalam DDR dapat dilihat dari kebijakan *one-man, one-gun* yaitu kebijakan untuk menyerahkan senjata maupun amunisi dalam tahapan pertama dalam DDR (*disarmament*; pelucutan senjata). Kebijakan *one-man, one-gun* dianggap memarginalkan tentara perempuan dan tentara anak-anak perempuan karena sebagian besar dari mereka memainkan peran sekunder, seperti juru masak, pekerja rumah tangga, hingga menjadi istri bagi komandan mereka (*bush wives*) daripada berperang di garis depan menggunakan senjata (UNIFEM, 2004: 32). Akibatnya, mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kriteria dasar dalam perlucutan senjata dalam DDR formal sehingga secara otomatis mereka juga tidak dapat memperoleh akses demobilisasi dan reintegrasi (Ettinger, 2006: 3). Dalam merespon adanya ketimpangan gender dalam DDR ini, UNICEF bekerja sama

dengan, *Ministry of Social Welfare, Gender and Children's Affairs* (MSWGCA), dan beberapa aktor INGO lainnya, seperti IRC merancang proyek-proyek lanjutan untuk menjangkau tentara anak perempuan yang luput dari proses DDR formal. Proyek-proyek lanjutan DDR mulai dilaksanakan dari tahun 2004-2008 ini diimplementasikan berdasar *statement* UNICEF tahun 2003, “...to address the needs of girls and young women who had still abducted as girls, as well as for the continuation of the *reintegration assistance*.”(Williamson, 2006: 191). Proyek-proyek lanjutan ini difokuskan pada agenda-agenda *community based* untuk lebih dapat menegakkan hak-hak anak bagi tentara anak perempuan yang tertindas baik selama perang maupun pasca-perang. Maka dari itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui bagaimana penegakan hak anak bagi tentara anak perempuan Sierra Leone oleh UNICEF dan IRC dalam proyek-proyek lanjutan DDR.

Artikel ini akan membahas mengenai penegakan hak anak bagi tentara anak perempuan Sierra Leone oleh

UNICEF dan IRC dalam proyek lanjutan DDR. UNICEF sendiri dipilih sebagai aktor internasional yang diteliti mengingat UNICEF merupakan satu-satunya IGO yang secara spesifik menangani perlindungan anak di Sierra Leone sejak 1993 dan menjadi koordinator bagi organisasi-organisasi lain dengan fokus perlindungan anak (Williamson & Cripe, 2002: 21). Sedangkan IRC dipilih sebagai contoh INGO karena merupakan aktor pelaksana utama dalam setiap pelaksanaan proyek-proyek lanjutan yang dimandatkan oleh UNICEF di Sierra Leone sejak 1999. UNICEF dan IRC juga merupakan sasaran donor dari *United States Agency for International Development* (USAID) sehingga keduanya lebih sering melakukan koordinasi satu sama lain (Williamson, 2005: vii).

Pembahasan

Kebijakan Pengarusutamaan Gender untuk Menegakkan Hak Anak bagi Tentara Anak Perempuan Sierra Leone dalam Proyek-proyek Lanjutan DDR oleh UNICEF dan IRC

Pentingnya pengarusutamaan gender atau pengarusutamaan gender pada kebijakan-kebijakan di dalam konteks pembangunan telah tercantum di sejumlah undang-undang internasional dan beberapa platform kebijakan, seperti; *UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang mulai diadopsi pada 1979 oleh Majelis Umum PBB; *Beijing Declaration and Platform for Action* (BPfA), yang diadopsi pada *Fourth World Conference on Women* (FWCW) tahun 1995; hingga Resolusi PBB 1325 yang diadopsi mulai tahun 2000 juga dijadikan platform kesetaraan gender yang secara spesifik mengangkat hak-hak perempuan dan anak perempuan dalam konflik. UNICEF dan IRC merupakan contoh organisasi internasional yang bergerak di bidang humanitarisme yang menggunakan prinsip *gender-based* dalam operasionalisasi kebijakan mereka sehingga pengangkatan pengarusutamaan gender juga tercantum dalam agenda kebijakan kedua organisasi tersebut.

Sejak tahun 1994, UNICEF telah mengangkat isu gender ke dalam *Policy on Gender Equality and Women Empowerment* (PGEWE) yang pada dasarnya ditujukan sebagai komitmen penuh dalam mempromosikan kesetaraan hak perempuan dan anak perempuan serta untuk mendukung partisipasi mereka dalam pembangunan politik, sosial, dan ekonomi di masyarakat. Dengan berfokus pada perwujudan atas kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki, serta bagi anak perempuan dan anak laki-laki, UNICEF dapat menjadi fasilitator dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan memungkinkan setiap orang untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya (UNICEF, 2018: 2). Di sisi lain, IRC sebagai contoh dari INGO dalam penelitian ini memiliki visi untuk membantu orang-orang yang sedang menghadapi krisis dalam konflik atau bencana sekaligus berusaha untuk mereintegrasikan mereka ke lingkungannya agar mereka kembali mendapatkan kendali atas masa depan. Pada tahun 1996, IRC merupakan INGO pertama yang bergerak di bidang humanitarianisme yang mengembangkan tim bantuan internasional (*international*

aid) yang didedikasikan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang sering mengalami diskriminasi dan marginalisasi dalam krisis atau konflik dengan program-program berbasis *gender-based anti-violence* (IRC, 2017).

Keterlibatan anak perempuan dalam perang sipil di Sierra Leone sebagai tentara merupakan bentuk penindasan hak-hak dasar mereka sebagai anak, seperti yang telah tercantum dalam empat prinsip dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC); (1) Non-diskriminasi—semua anak baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya; (2) Kepentingan terbaik bagi anak; (3) Hak untuk hidup, melangsungkan hidup, dan berkembang; dan (4) Hak untuk dihargai pandangannya (UNCRC, n.d). Selain itu, dalam konteks perang atau konflik, keterlibatan anak perempuan dalam perang meyimpang dari Article 38 yang menyebutkan peran dan tanggung jawab negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak seluruh anak-anak dalam situasi konflik bersenjata dan untuk memastikan

bahwa hukum humaniter internasional telah ditegakkan. Selain itu, marginalisasi tentara anak perempuan dalam program pasca-konflik, seperti DDR merupakan pelanggaran terhadap Article 39 UNCRC yang berisi promosi pemulihan pasca-perang dan reintegrasi semua anak-anak di lingkungan yang dapat mendukung kesehatan mental, harga diri, dan martabat mereka (Siegrist, 2010: 5).

Adanya perbedaan pengalaman tentara anak laki-laki dan tentara anak perempuan dalam perang sipil menjadi salah satu alasan UNICEF dan IRC untuk lebih memerhatikan isu gender dalam proyek-proyek lanjutan melalui pengarusutamaan gender sebagai upaya untuk mengurangi GBV yang lebih banyak dihadapi oleh tentara anak perempuan Sierra Leone. Proyek-proyek lanjutan tersebut bertujuan untuk memberikan akses kepada anak perempuan yang sebelumnya tidak terjangkau oleh program DDR melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, hingga pemulihan trauma. Pelayanan dalam pengupayaan pengarusutamaan gender dalam proyek lanjutan UNICEF dan IRC tersebut mendorong integrasi anak

perempuan Sierra Leone baik dalam aspek psikologis, sosial, dan budaya yang ketiganya menjadi aspek penting yang perlu diprioritaskan dalam program rekonstruksi untuk mempromosikan kesejahteraan tentara anak perempuan pasca-perang. Dalam aspek psikologis, UNICEF dan IRC menekankan pendekatan keagamaan atau *faith-based healing* (berdasar nilai-nilai Kristiani atau Islam; yang merupakan dua agama mayoritas di Sierra Leone) sebagai pemulihan trauma untuk mendukung reintegrasi anak perempuan yang telah mengalami pelecehan seksual dan kekerasan selama perang. Pelayanan kesehatan juga lebih ditekankan bagi tentara anak perempuan mengingat kebutuhan khusus yang mereka miliki karena sebagian mereka sedang hamil dan telah memiliki bayi, terlebih lagi juga mereka lebih rentan akan penyakit HIV/AIDS akibat kekerasan seksual yang mereka alami (Williamson, 2005: x). Dalam aspek sosial, UNICEF dan IRC berfokus pada pelayanan pendidikan dan *skill training*—seperti cara membaca, menulis, dan berhitung—yang terbuka bagi seluruh anak perempuan yang telah memiliki anak maupun yang sedang

hamil. Hal ini sangat diperlukan bagi anak perempuan di Sierra Leone karena angka pendidikan bagi anak perempuan masih minim jika dibandingkan dengan anak laki-laki mengingat rentannya kehamilan dan pernikahan dini akibat perang sehingga mereka tidak dapat bersekolah atau melanjutkan sekolah karena khawatir akan stigma negatif. Menurut data pemerintah Sierra Leone tahun 2003, dari total murid sekolah dasar dan menengah yaitu 63% diantaranya anak laki-laki, sedangkan 37% lainnya adalah anak perempuan (Pemerintah Sierra Leone, 2014). Selain itu, pelayanan pendidikan juga memiliki nilai psiko-sosial yang signifikan karena dapat meningkatkan interaksi dan kemampuan beradaptasi tentara anak perempuan dalam komunitas mereka sehingga dapat berkontribusi dalam pemulihan trauma dan mental mereka. Di aspek budaya, UNICEF dan IRC menggunakan pendekatan *community-based* yang berfokus pada sosialisasi masyarakat atau komunitas untuk mendukung upaya reintegrasi tentara anak perempuan ke dalam lingkungan mereka yang cenderung patriarkal. Hal ini dilakukan untuk menghapus asumsi-asumsi

tradisional yang menimbulkan stigma negatif mengenai peran anak perempuan dalam konflik (Williamson, 2005: 10).

Upaya pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh UNICEF dan IRC ini pada dasarnya dilakukan untuk memperluas akses pendidikan, kesehatan, dan memulihkan trauma psiko-sosial yang dialami oleh tentara anak perempuan Sierra Leone serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus mereka sebagai anak perempuan yang sebelumnya luput dari fokus DDR. Cedera maupun cacat fisik yang dialami oleh tentara anak perempuan selama konflik—seperti pemberian tato kepada setiap tentara anak yang tergabung dalam *Revolutionary United Front (RUF)*²—diperparah dengan adanya pengalaman terhadap kekerasan seksual yang sebagian besar dialami oleh anak perempuan saat konflik dapat berdampak pada penurunan rasa percaya diri terhadap martabat mereka sebagai seorang manusia (Enloe, 2014: 76). Dalam hal ini, adanya proyek-

² *Revolutionary United Front (RUF)* merupakan kelompok pemberontak yang melawan pemerintah dan dipimpin oleh Foday Sankoh. RUF merupakan angkatan bersenjata Sierra Leone yang paling banyak merekrut anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki, untuk menjadi tentara.

proyek lanjutan yang berlandaskan pengarusutamaan gender dapat membantu mereka dalam mengembangkan *soft-skill* atau pelatihan keterampilan sehingga mereka dapat mencapai potensi sepenuhnya dan dapat kembali ke lingkungan mereka. Pemberdayaan anak perempuan melalui *soft-skill* dapat mendorong adanya penerimaan masyarakat terhadap status mereka sebagai mantan tentara anak karena partisipasi tersebut dilihat sebagai bukti komitmen mereka terhadap peran konstruktif terhadap lingkungannya (Wiliamson, 2005: 10). Partisipasi yang diiringi dengan pengembangan *soft-skill* tersebut dapat memperbesar peluang dan kapasitas tentara anak perempuan untuk memiliki akses pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik yang nantinya mengarah pada kesetaraan gender. Kesetaraan gender sendiri merupakan salah satu prasyarat untuk memajukan pembangunan dan mengurangi kemiskinan; mantan tentara anak perempuan yang diberdayakan dapat berkontribusi pada produktivitas keluarganya yang otomatis akan berdampak pada kualitas masyarakat dan sumber daya manusia sehingga mereka

dapat meningkatkan prospek untuk generasi berikutnya sekaligus juga dapat memperkecil tingkat kemiskinan di Sierra Leone (UNFPA, n.d).

Kebijakan *Inclusive Citizenship* untuk Menegakkan Hak Anak bagi Tentara Anak Perempuan Sierra Leone dalam Proyek-proyek Lanjutan DDR oleh UNICEF dan IRC

Pentingnya perwujudan kewarganegaraan yang inklusif terutama untuk anak-anak sejatinya telah tercantum dalam beberapa *framework* atau mandat internasional. Salah satunya yaitu dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) yang dimandatkan tahun 1989, merupakan konvensi yang mengatur hak sipil, ekonomi, politik, hingga budaya dalam lingkungan mereka. Terdapat setidaknya tiga pasal yang menjadi prinsip keterlibatan peran anak-anak dalam lingkungan mereka; (1) Pasal 2 UNCRC 1989, menyatakan bahwa semua anak pada dasarnya juga memiliki peran sebagai aktor sosial yang kompeten dan dapat memberikan kontribusi penting bagi masyarakat tanpa diskriminasi

(IAWGCP, 2008: 3); (2) Pasal 3, mengenai pertimbangan yang melibatkan seluruh aspek masyarakat untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak-anak; (3) Pasal 6, hak anak untuk mendapatkan hidup yang layak dan terlindungi (KidsRight, 2014: 11); dan (4) Pasal 12 yang menekankan bahwa negara harus menjamin kebebasan berekspresi anak agar mereka dapat bebas membentuk pandangan mereka masing-masing mengenai kehidupan dan di lingkungan di sekitar mereka (Roche, 1999: 482). Osler dan Starkey (2005 dalam Bacon & Frankel, 2014: 26) menyatakan bahwa keempat prinsip dalam konvensi tersebut menunjukkan pemberian hak kepada anak-anak untuk mengekspresikan pandangan mereka dan menerima informasi, serta terlibat dalam pembuatan keputusan di lingkungan sekitar mereka. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwasannya anak-anak merupakan warga negara (*citizen*), dan bukan hanya sekedar warga negara yang tertunda (*citizen-in-waiting*). Sebagai bagian dari warga negara, anak-anak memiliki kepentingan yang kuat dalam pengembangan masyarakat dengan turut berpartisipasi sebagai agen, seperti halnya

orang dewasa (Lister, 2007b: 695). Oleh karena itu, anak-anak memiliki peran dalam masyarakat tidak hanya sebagai orang yang belajar tentang kewarganegaraan atau belajar untuk menjadi warga negara yang baik saja, namun mereka juga memiliki peran untuk mendefinisikan, membangun, dan bekerja dengan nilai-nilai kewarganegaraan pada tingkat yang sangat mikro.

UNICEF dan IRC juga mengangkat signifikansi peran anak-anak dalam masyarakat mereka melalui agenda operasionalnya. UNICEF memiliki inisiatif yang disebut *Child Friendly Cities Initiative* (CFCI) yang dicanangkan sejak tahun 1996 dan berkomitmen untuk mengimplementasikan UNCRC secara optimal. CFCI membantu memfasilitasi anak-anak untuk lebih mengenali peran mereka dalam masyarakat, seperti; partisipasi dalam keluarga, komunitas, dan kehidupan sosial; dan kesempatan akses yang sama terhadap semua layanan masyarakat, terlepas dari etnis, agama, gender, atau disabilitas (Harris & Manatakis, 2013: 11). Di sisi lain, IRC dalam salah satu visinya bertujuan untuk membantu anak-anak dan remaja untuk

hidup dalam masyarakat di mana mereka merasa terlindungi, diterima, dan mampu mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Salah satu tujuan inti IRC dalam mencapai visi ini adalah dengan berfokus pada penanganan atau respon serta pencegahan terhadap pelecehan, eksploitasi, dan pengabaian anak-anak dalam masyarakat mereka (Violence Prevention Alliance, n.d). Kurang efektifnya program DDR Sierra Leone untuk meinklusifkan tentara anak perempuan menjadi pembelajaran sendiri bagi komunitas internasional termasuk UNICEF dan IRC untuk lebih berfokus pada *framework* yang lebih dapat menjangkau tentara anak perempuan. *Framework* dan mandat internasional yang diadopsi oleh UNICEF dan IRC menjadi peluang baru bagi terjaminnya hak-hak kewarganegaraan anak-anak, termasuk perlindungan, *provisory*, dan hak partisipatif.

Di Sierra Leone, tentara anak perempuan mengalami penolakan oleh masyarakat karena mereka takut akan dampak yang ditimbulkan oleh tentara anak perempuan tersebut terhadap lingkungan mereka. Perilaku anti-sosial

dari tentara anak perempuan, seperti agresif, temperamen dan suka bertengkar, menggunakan bahasa kasar, menyalahgunakan narkoba, dan merokok, dianggap masyarakat melanggar norma gender sehingga memengaruhi kemampuan tentara anak perempuan untuk menyesuaikan diri kembali dengan komunitas mereka dan respon masyarakat terhadap mereka (McKay & Mazurana, 2004: 38). Ketakutan dan prasangka masyarakat ini diwujudkan ke dalam perilaku stigmatisasi seperti pemberian julukan (*name-calling*), penolakan, pengecualian sosial, dan perlakuan diskriminatif. Tentara anak perempuan Sierra Leone yang mengalami stigmatisasi negatif ini berisiko dijuluki sebagai "anak-anak yang tidak diinginkan", "kenangan buruk perang sipil", atau "pelaku kejahatan perang" yang dapat mengancam identitas dan kepercayaan diri mereka (Aase, 2013: 15). Menurut penelitian kuantitatif Betancourt, sebanyak 73% tentara anak perempuan mengalami stigmatisasi maupun penolakan masyarakat (Betancourt et al, 2009).

UNICEF dan IRC membantu menumbuhkan partisipasi tentara anak perempuan Sierra Leone yang sebelumnya tidak terjangkau oleh program DDR demi mewujudkan masyarakat yang inklusif salah satunya melalui proyek *community sensitization*. Proyek ini menekankan pendekatan kepada kepala-kepala suku dan memberi tahu mereka mengenai kondisi dan kebutuhan khusus tentara anak perempuan dengan memberi sosialisasi bahwa anak-anak perempuan yang terlibat dalam perang sipil pada dasarnya karena terpaksa atau diculik dan bukan merupakan inisiatif dasar mereka untuk melakukan kekerasan. Kepala-kepala suku kemudian dihibau untuk mendekati dan mengarahkan tokoh-tokoh penting lainnya di masyarakat, seperti otoritas sipil, pemimpin agama, kepala himpunan lokal, hingga guru yang pada akhirnya berdampak pada pemahaman masyarakat secara umum mengenai kondisi dan situasi yang dialami oleh tentara anak perempuan. *Community sensitization* yang dilakukan oleh UNICEF dan IRC dibantu dengan *International Criminal Court (ICC)* juga meliputi kunjungan ke rumah-rumah

untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat sekitar secara langsung mengenai pentingnya dukungan mereka terhadap tentara anak perempuan yang berhasil dimobilisasi dalam proyek lanjutan DDR bagi proses reintegrasi. UNICEF dan IRC juga melakukan *family tracing* sekaligus mediasi melalui anggota keluarga dari tentara anak perempuan mengingat tidak semua keluarga ingin menerima mereka yang kembali dari perang sipil. Para keluarga, terutama orang tua, diberikan informasi mengenai pentingnya dukungan mereka terhadap anak mereka serta menyerukan anggota keluarga untuk membantu proses reintegrasi salah satunya dengan memberi dorongan moral kepada mereka untuk mengikuti proyek lanjutan DDR, termasuk berpartisipasi dalam program edukasi dan pengembangan *soft-skill*. Pendekatan yang dilakukan oleh UNICEF dan IRC terhadap masyarakat dan keluarga akan membantu penerimaan kembali tentara anak perempuan sehingga memudahkan proses adaptasi karena mereka merasa diterima di lingkungan mereka (Williamson & Cripe, .2002: 28). Kondisi yang seperti ini akan berdampak pada kesempatan dan kesediaan tentara

anak perempuan untuk turut terlibat dalam praktik sosial dalam masyarakat.

Selain *community sensitization*, UNICEF dan IRC juga membantu implementasi dari *Truth and Reconciliation Commission* (TRC) Sierra Leone yang dibentuk tahun 1999. TRC Sierra Leone sendiri merupakan komisi rekonsiliasi pertama yang meletakkan perhatian khusus pada pengalaman anak-anak yang terkena dampak konflik. Sebagai sebuah badan non-judisial sementara yang dimandatkan untuk menyelidiki, mendokumentasikan, dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia—termasuk hak anak—selama perang sipil, TRC berfokus pada diskusi publik tentang akuntabilitas dan reformasi sosial yang ditujukan untuk membangun kapasitas masyarakat untuk menciptakan warga negara yang lebih aktif dan partisipatif. Tentara anak perempuan juga dilibatkan untuk mengekspresikan pandangan mereka dan pengalaman mereka serta apa yang dapat mereka harapkan bagi Sierra Leone kedepannya. Dalam implementasinya, TRC dibantu oleh staf perempuan dari UNICEF maupun IRC untuk membangun

kepercayaan tentara anak perempuan sehingga mereka dapat menceritakan pengalaman dan keterlibatannya dalam perang sipil secara sukarela sekaligus memberikan pandangan mereka mengenai apa yang seharusnya masyarakat sekitar harus lakukan untuk membantu mereka menghadapi dampak perang tersebut (UNAMSIL, 2001: 5). Asumsi dari tentara anak perempuan kemudian dipertimbangkan untuk upaya reintegrasi dan proses pengembangan masyarakat Sierra Leone. Pengalaman dan kisah hidup tentara anak perempuan yang lebih rentan terhadap dampak perang sipil didokumentasikan dan dimasukkan ke dalam catatan historis perang sehingga dapat memberikan pembelajaran sekaligus gambaran empiris mengenai pelanggaran hak-hak anak serta menetapkan agenda hak anak untuk masa depan Sierra Leone (UNAMSIL, 2001: 10). Hal ini kemudian menunjukkan bahwa perspektif dan pengalaman anak-anak perempuan yang pernah terlibat dalam perang sipil dinilai penting sebagai dokumentasi masa lalu dan peluang akan masa depan (Williamson, 2005: 9). Dilibatkannya tentara anak perempuan dalam TRC pada dasarnya ditujukan agar

mereka juga dilihat sebagai bagian dari masyarakat, dengan suara dan perspektif yang patut dipertimbangkan.

UNICEF dan IRC dalam konteks *inclusive citizenship* ini membantu tentara anak perempuan untuk dapat pulih dari dampak perang sipil agar dapat membangun komunitas yang lebih aman dan memahami hak-hak kewarganegaraan mereka dalam masyarakat (IRC, n.d). Hal ini mengarah pada partisipasi tentara anak perempuan yang lebih besar dalam keluarga, lembaga dan kehidupan bermasyarakat, serta meningkatkan rasa tanggung jawab sosial dan hak warga negara mereka yang termasuk faktor penting bagi peran kewarganegaraan dan kepemimpinan masa depan.

Kesimpulan

Proyek-proyek lanjutan DDR yang dicanangkan oleh UNICEF dan IRC bagi tentara anak perempuan Sierra Leone menjadi upaya untuk mengintegrasikan mereka kembali ke lingkungan mereka sekaligus sebagai wujud dari realisasi dan komitmen terhadap prospek pembangunan perdamaian setelah upaya-

upaya pasca-perang—seperti DDR—sebelumnya dinilai kurang *gender-responsive*. Upaya ini dilakukan mengingat kegagalan untuk memenuhi kebutuhan tentara anak perempuan termasuk anak-anak yang mereka lahirkan saat konflik bukan sekedar masalah yang berakibat jangka pendek, namun juga berpengaruh pada kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia di Sierra Leone dalam jangka panjang. Terbatasnya kapasitas pemerintah Sierra Leone dalam memfasilitasi perwujudan hak-hak asasi tentara anak perempuan yang menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang memberikan ruang bagi organisasi internasional seperti UNICEF dan IRC untuk turut terlibat dengan proyek-proyek lanjutan dari program DDR formal yang implementasinya kurang menjangkau hak-hak anak bagi tentara anak perempuan.

Proyek-proyek lanjutan yang lebih menekankan pada upaya pengarusutamaan gender dan *inclusive citizenship* bagi tentara anak perempuan berfokus pada demobilisasi lanjutan, *family tracing*, reunifikasi keluarga,

minimalisasi stigma buruk dalam masyarakat, pelayanan pendidikan, kesehatan—baik bagi mereka maupun anak yang mereka lahirkan dalam konflik, hingga pelatihan *soft-skill* yang sebelumnya tidak ditemui dalam program DDR formal menjadi upaya lanjutan rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian pasca-perang. Proyek-proyek lanjutan UNICEF dan IRC tersebut dapat berperan penting dalam penegakan hak anak bagi tentara anak perempuan Sierra Leone yang diimplementasikan melalui fasilitas reintegrasi, termasuk penyembuhan fisik, dan rekonsiliasi psiko-sosial dengan keluarga dan komunitas bagi tentara anak perempuan yang sebelumnya tidak terjangkau oleh DDR formal. Kebijakan melalui pengarusutamaan gender dan *inclusive citizenship* dalam proyek-proyek lanjutan DDR tersebut merupakan upaya untuk mencegah tentara anak perempuan menjadi terlantar termasuk *Internally Displaced Person (IDP)*, *refugee*, maupun *street kids* karena akan lebih rentan terhadap rekrutmen dan tindakan-tindakan yang masih berkaitan dengan konflik bersenjata dan kriminal lainnya yang merupakan ancaman terhadap hak

anak untuk dilindungi dari segala bentuk ancaman.

Referensi:

- Aase, Camilla Carlsen. 2013. *The voices of the invisible girls Reintegration of former female child soldiers in Burundi*, Master Thesis, University of Adger.
- Bacon, Kate dan Sam Frankel. 2014. "Rethinking Childrens's Citizenship: Negotiating Structure, Shaping Meanings," dalam *International Journal of Children's Rights*, 22(1): 21-42.
- Enloe, Cynthia. 2014. *Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics*. California: University of California Press.
- Ettinger, Lauren. 2016. *One Man, One Gun, No More: Exploring Women's Experiences in Disarmament, Demobilization, and Reintegration*. Thesis, George Mason University.
- Government of Sierra Leone. 2014. *Country Report by Sierra Leone*.

- [online]. Tersedia dalam <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/acaps-country-profile-sierra-leone.pdf>, diakses 29 September 2018.
- Harris, Pauline dan Harry Manatakis. 2013. *Children's Voices: A principled framework for children and young people's participation as valued citizens and learners*, Department for Education and Child Development, Government of South Australia.
- Inter-Agency Working Group on Children's Participation (IAWGCP). 2008. "Defining Children's Citizenship and Civil Rights," dalam *Children as Active Citizen*. Bangkok: Inter-Agency Working Group on Children's Participation.
- IRC. 2017. *Gender equality: Breaking down barriers for women and girls*. [online]. Tersedia dalam <https://www.rescue.org/article/breaking-down-barriers-women-and-girls>, diakses 22 September 2018.
- IRC. n.d. *Where we focus: Safety*, [online]. Tersedia dalam <https://www.rescue.org/outcome/safety>, diakses 12 September 2018.
- KidsRight Foundation. 2014. *Child Participation: From Rights to Reality*, KidsRight Report, Universiteit Leiden.
- Lister, Ruth. 2007b. "Why citizenship? Where, when and how children?," dalam *Theoretical inquiries in law*, 8(2): 693-718.
- Mazurana, Dyan dan Khristopher Carlson. 2004. *From Combat to Community: Women and Girls of Sierra Leone*. Cambridge, MA: Women Waging Peace Policy Commission.
- McKay, Susan dan Dyan E. Mazurana. 2004. *Where Are the Girls?: Girls in Fighting Forces in Northern Uganda, Sierra Leone and Mozambique: Their Lives During and After War*. Montréal, Quebec: Rights & Democracy.

- Roche, Jeremy. 1999. "Children Rights, Participation and Citizenship," dalam *Childhood*, 6(4): 475-493.
- Siegrist, Saudamini. 2010. "Child Rights and Transitional Justice," dalam Sharanjeet Parmar, Mindy Jane Roseman, Saudamini Siegrist, Theo Sowa (eds.) *Children and Transitional Justice: Truth-Telling, Accountability and Reconciliation*. Cambridge: Human Rights Program at Harvard Law School.
- Solomon, Christiana dan Jeremy Ginifer. 2008. *Disarmament, Demobilisation and Reintegration in Sierra Leone*. Centre for International Cooperation and Security (CISAC).
- The Convention on the Rights of the Child. n.d. *Guiding Principles*. [online]. Tersedia dalam https://www.unicef.org/crc/files/Guiding_Principles.pdf, diakses 7 September 2018
- UNAMSIL. 2001. *Children and The Truth and Reconciliation Commission for Sierra Leone*, A Report based on a technical meeting on children and the TRC (4-6 June 2001).
- UNAMSIL. 2005. Thousands of Ex-Fighters Disarmed and Reintegrated. [online]. Tersedia dalam https://peacekeeping.un.org/mission/past/unamsil/factsheet1_DDR.pdf, diakses 12 Januari 2019
- UNFPA. n.d. *Gender Equality*, [online] Tersedia dalam <https://www.unfpa.org/gender-equality>, diakses 26 September 2018.
- UNICEF. 2018. *Evaluation of Gender Policy Implementation in UNICEF: Planned Follow-up Action*, Annual session, 5-8 Juni 2018.
- UNIFEM. 2004. *Getting it Right, Doing it Right: Gender and Disarmament, Demobilization and Reintegration*. New York: UNIFEM.
- Violence Prevention Alliance (VPA). n.d. *International Rescue Committee*, [online]. Tersedia dalam <http://www.who.int/violenceprevent>

[ion/about/participants/irc/en/](#),

diakses 8 September 2018

Williamson, John dan Lynne Cripe. 2002.

Assessment of DCOF-Supported Child Demobilization and Reintegration Activities in Sierra Leone, An evaluation report for USAID (June 2002).

Williamson, John. 2005. *Reintegration of*

Child Soldiers in Sierra Leone, A

review by the United States Agency for International Development's Displaced Children and Orphans Fund (USAID-DCOF), January 31 - February 9.

Williamson, John. 2006. "The disarmament, demobilization and reintegration of child soldiers: social and psychological transformation in Sierra Leone," dalam *Intervention*, 4(3): 185-205